

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Transmigrasi sebagai model pembangunan komunitas masyarakat mempunyai tiga sasaran pokok. *Pertama*, meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi (transmigrasi dan masyarakat sekitar Permukiman transmigrasi). *Kedua*, membangun kemandirian (transmigran dan masyarakat sekitar permukiman transmigrasi), dan *ketiga*, mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi, sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Esensi dari ketiga sasaran tersebut diharapkan dapat membangun komunitas masyarakat melalui upaya pemberdayaan dan pengembangan potensi sumber daya wilayah dan pengarahan perpindahan penduduk. Artinya pembangunan transmigrasi merupakan suatu proses yang tidak henti-hentinya yang melibatkan (minimal) dua pemerintah daerah, untuk mewujudkan suatu komunitas tumbuh dan berkembang secara dinamis, produktif, maju, dan mandiri dalam suasana yang harmonis dan sejahtera.

Daerah transmigrasi memang sengaja dibangun oleh pemerintah Republik Indonesia (RI) sebagai tempat pemukiman penduduk yang dipindahkan atau pindah dari suatu daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Penduduk yang bermukim disana berasal dari berbagai daerah yang datang dengan harapan akan memperoleh kehidupan yang lebih baik, sehingga banyak bermunculan anggapan-anggapan

yang mengatakan bahwa orang - orang yang mengikuti transmigrasi atau biasa disebut *orang trans* adalah orang buangan dari daerah asalnya, atau yang lebih menyakitkan lagi adalah orang yang melarikan diri dari daerah asalnya karena tidak bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Kehidupan yang baru di daerah transmigrasi membawa dampak negatif yang tidak sedikit bagi para transmigran.

Sejarah transmigrasi di Indonesia dimulai sejak dilaksanakannya kolonisasi oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1905. Kebijakan kolonisasi penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa dilatarbelakangi oleh: (1) Melaksanakan salah satu program politik etis, yaitu emigrasi untuk mengurangi jumlah penduduk pulau Jawa dan memperbaiki taraf kehidupan yang masih rendah. (2) Pemilikan tanah yang makin sempit di pulau Jawa akibat penambahan penduduk yang cepat telah menyebabkan taraf hidup masyarakat di pulau Jawa semakin menurun. (3) Adanya kebutuhan pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan swasta akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan dan pertambangan di luar pulau Jawa.

Pengaruh depresi ekonomi dalam memperlancar kolonisasi cukup signifikan. Kolonisasi juga dapat terus berlanjut hanya dengan sedikit bantuan finansial dari pemerintah. Mereka yang tertarik pindah hanya diberikan pinjaman uang 22-25 gulden setiap keluarga untuk biaya transportasi, pembelian alat-alat pertanian, yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 2-3 tahun. Di tempat yang baru pemerintah hanya memberikan lahan secara gratis untuk diolah. Sejak tahun 1930 terjadi arus perpindahan penduduk dari pulau ke luar Jawa melalui kolonisasi secara besar-besaran.

Ketika tentara Jepang masuk ke Indonesia, kegiatan transmigrasi tetap dilaksanakan. Akan tetapi karena sibuk dengan peperangan, rupanya penguasa Jepang tidak sempat melakukan pengadministrasian kegiatan transmigrasi seperti halnya pada jaman pemerintah kolonial Belanda, sehingga sangat sedikit dokumentasi mengenai transmigrasi yang bisa ditemukan. Diperkirakan selama kekuasaan Jepang, penduduk pulau Jawa yang berhasil dipindahkan ke luar Jawa melalui transmigrasi sekitar 2.000 orang. Tidak hanya di bidang transmigrasi, kondisi kependudukan yang parah dimulai ketika tentara Jepang mengambil alih kekuasaan daripemerintahan Belanda. Pada periode ini kondisi perekonomian di Indonesia sangat buruk. Beberapa komoditi seperti tekstil, alat-alat pertanian, bahan pangan menghilang dari pasaran. Terjadi pula mobilisasi tenaga kerja (romusha) untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan dan proyek-proyek pertahanan Jepang, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pada jaman orde lama, ada pengkategorian transmigrasi, sehingga dikenal istilah transmigrasi umum, transmigrasi keluarga, transmigrasi biaya sendiri, dan transmigrasi spontan. Dalam sistem transmigrasi umum segala keperluan transmigran, sejak pendaftaran sampai di lokasi menjadi tanggungan pemerintah. Pemerintah juga menanggung biaya hidup selama delapan bulan pertama, bibit tanaman, serta alat-alat pertanian.

Pada zaman orde baru, tujuan utama transmigrasi tidak semata-mata memindahkan penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa, namun ada penekanan pada tujuan memproduksi beras dalam kaitan pencapaian swasembada pangan.

Pembukaan daerah transmigrasi diperluas ke wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, bahkan sampai ke Papua.

Penyempurnaan pelaksanaan transmigrasi yang diperlukan antara lain, agar transmigrasi diupayakan secara merata di wilayah tanah air, dan pemukiman transmigran tidak merupakan *enclave* serta memiliki keterkaitan fungsional dengan kawasan di sekitarnya. Berbagai kelompok etnis harus berbaur dalam kebhinekaan, penduduk setempat juga harus mendapat perhatian yang sama, dengan tujuan untuk meredam potensi.

Konflik antara pendatang dan penduduk asli. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka pemerintah daerah akan memiliki tanggung jawab dan wewenang yang lebih besar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing. Sehingga, pembangunan transmigrasi harus diletakkan pada kerangka pembangunan daerah yang selanjutnya harus dapat dijabarkan dalam program-program transmigrasi.

Berdasarkan pada penjelasan di atas visi transmigrasi ke depan adalah “mewujudkan komunitas baru yang merupakan hasil integrasi harmonis antara penduduk setempat dan masyarakat pendatang, yang sejahtera serta dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri dan berkelanjutan”. Adapun misinya adalah isi pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan pendatang, serta sesuai dengan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan Nasional”.

Di desa Karangetang kecamatan Dengilo merupakan salah satu daerah tujuan transmigrasi dan kondisi sekarang hampir 80% penduduknya adalah

transmigrasi Sangir, dengan keadaan lahan dan jenis tanah di desa ini sangat mendukung dalam proses untuk lahan pertanian dan perkebunan.

Kedatangan para masyarakat Sangihe Talaud tentu sangat mempengaruhi hubungan – hubungan sosial yang terjadi baik di antara masyarakat penduduk asli maupun sesama masyarakat Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan menformulasikannya dalam judul ***”TRANSMIGRASI MASYARAKAT ETNIK SANGIHE TALAUD DIKARANGETANG”***.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas diuraikan dan agar pembahasan terfokus pada permasalahan yang ada maka ruang lingkup sejarah dan masalah yang akan penulis angkat ialah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perkembangan transmigrasi masyarakat etnik Sangihe Talaud di Karangetang?
- 2) Bagaimana kehidupan transmigrasi masyarakat etnik Sangihe Talaud di Karangetang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini tidak lepas dari rumusan masalah di atas yaitu:

- 1) Untuk mengetahui perkembangan transmigrasi masyarakat etnik Sangihe Talaud di Karangetang.
- 2) Untuk mengetahui kehidupan transmigrasi masyarakat etnik Sangihe Talaud di Karangetang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang di harapkan dapat di peroleh dalam penelitian inisebagai berikut:

- 1) Agar para pembaca, dan sejarahwan mampu menggali dan mengkaji kembali tentang masyarakat transmigrasi etnik Sangihe Talaud di Karangetang.
- 2) Agar para pembaca, dan penulis dan sejarahwan mendapatkan manfaat masyarakat transmigrasi etnik Sangihe Talaud di Karangetang